



INTISARI

Cap and trade merupakan sebuah skema yang dirancang sebagai salah satu instrumen ekonomi untuk mendorong penurunan emisi gas rumah kaca. Skema *cap and trade* dirancang untuk menawarkan solusi dari *market failure* dalam proses pembuangan emisi gas rumah kaca ke atmosfer melalui proses internalisasi biaya lingkungan hidup. Skema ini mulai mendapat perhatian di Indonesia pasca ratifikasi *Paris Agreement* melalui UU Nomor 16 tahun 2016. Selanjutnya, berbagai peraturan pelaksana telah disahkan untuk memuluskan pelaksanaan perdagangan emisi berbasis skema *cap and trade*. Kegiatan perdagangan emisi dengan skema *Cap and Trade* memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan negara dengan sangat signifikan. Perdagangan emisi dengan skema *Cap and Trade* juga dapat mengisi kekosongan alasan mengapa perusahaan yang berorientasi keuntungan sebaiknya mulai mempertimbangkan untuk mengurangi emisi.

Penelitian hukum ini difokuskan untuk mengkaji kematangan regulasi perdagangan karbon di Indonesia pada subsektor pembangkit tenaga listrik. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini antara lain 1) konsepsi pengaturan mengenai perdagangan emisi pada sub sektor pembangkit tenaga listrik di Indonesia; dan 2) konsistensi konsepsi pengaturan tersebut dengan komitmen Indonesia terhadap *Paris Agreement* untuk mewujudkan *Net Zero Emission* di tahun 2060. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang didukung dengan data sekunder dari berbagai literatur dan wawancara dengan ahli hukum lingkungan. Hasil penelitian ini adalah pengaturan hukum mekanisme perdagangan emisi telah mencakup seluruh aspek penyelenggaraan perdagangan emisi, namun beberapa hal belum diatur secara rinci. Secara normatif, mekanisme perdagangan emisi tersebut telah sejalan dengan *Paris Agreement*, namun konsistensinya secara empiris masih membutuhkan penelitian lebih lanjut.

Kata kunci: Mekanisme Perdagangan Emisi; ETS; *Paris Agreement*; Perubahan Iklim; Pemanasan Global.

ABSTRACT

Cap and trade is a scheme designed as an economic instrument to encourage the reduction of greenhouse gas emissions. The cap and trade scheme is designed to offer a solution to the market failure in the process of releasing greenhouse gas emissions into the atmosphere through the process of internalizing environmental costs. This scheme began to receive attention in Indonesia after the ratification of the Paris Agreement through Law Number 16 of 2016. Furthermore, various implementing regulations have been passed to pave the way to implement said emissions trading mechanism based on the cap and trade scheme. Emissions trading activities using the cap and trade scheme have a huge potential to increase state revenues. Emissions trading with the cap and trade scheme can also fill the gap in why profit-oriented companies should start considering reducing emissions.

This legal research is focused on examining the maturity of carbon trading regulations in Indonesia in the power generation sub-sector. The problems studied in this research are 1) the regulatory conception of emissions trading in the electricity generation sub-sector in Indonesia; and 2) the consistency of said regulatory conception with Indonesia's commitment to the Paris Agreement to realize Net Zero Emissions by 2060. This research was conducted using a normative juridical method using a statutory regulatory approach supported by secondary data from various literature and interviews with environmental law experts. The result of this research is that the legal regulation of emissions trading mechanisms covers all aspects of implementing emissions trading, but several things have not been regulated in detail. In terms of regulatory compliance, the emissions trading mechanism is in line with the Paris Agreement, but whether it is consistent with the Paris Agreement in practice still requires further research.

Keywords: Emission Trading System; ETS; Paris Agreement; Climate Change; Global Warming